

orang yang pemboros, maka harus ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab mengurus harta benda orang tersebut.

Orang yang tidak cakap berbuat hukum sendiri, sama halnya dengan perbuatan orang itu terhalang oleh syara atas harta bendanya. Jika halangan itu sudah lenyap/hilang, dalam arti anak itu sudah dewasa atau orang tersebut telah sembuh dari gilanya, maka perwalian atas manusia yang dianggap tidak cakap bertindak hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan si pemilik harta benda telah boleh bertindak dan mengambil manfaat dari hak miliknya itu.

Disamping hak milik itu sifatnya individu, juga bersifat sosial, maksudnya hak milik itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Karenanya, Islam melarang terhadap perbuatan orang yang memborong, menyimpan atau menyembunyikan barang yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. (Zuhdy, 1988:87).

Misalnya, orang yang menyimpan bahan makanan, dengan maksud agar barang tersebut sukar dicari di pasaran bebas, sehingga mengakibatkan masyarakat berani membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan barang tersebut. Sedang pemilik barang yang tidak jujur tadi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil penyimpanan bahan makanan itu. Berkenaan dengan perbu-

ad a. Milik penuh

Milik penuh atau milik sempurna yaitu suatu hak milik yang dipunyai seseorang, yang meliputi zat dari benda dan manfaat benda tersebut. Terhadap milik penuh si pemilik boleh berbuat apa saja terhadap bendanya. Ia boleh mengambil manfaatnya atau di sewakan kepada orang lain manfaat dari bendanya.

Sehubungan dengan milik penuh ini, Masdhuha A. R. menyatakan ciri-ciri khusus yang berkenaan dengan milik penuh yaitu:

- 1). Pemilik dapat berbuat apa saja secara mutlak terhadap benda dan memanfaatkannya dengan segala tindakan yang dibenarkan syara', seperti menjual, menyewakan, meminjamkan dan sebagainya asal tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik perseorangan, masyarakat maupun negara.
- 2). Pemilik dapat mengambil manfaat benda yang dimiliki dengan segala cara pengambilan manfaat tanpa dibatasi dengan waktu, tempat serta bentuk tertentu asal tidak dilarang syara seperti menjadikan rumahnya untuk tempat berjudi.
- 3). Milik tidak mempunyai batas akhir, karena milik tidak dibatasi waktu dan tempat, kecuali adanya pemindahan milik yang sesuai dengan hu

pat ataupun sifat pengambilan manfaat sejak timbulnya.

- b). Tidak dapat diwarisi menurut Fuqaha' golongan Hanafi, karena menurut mereka yang diwarisi hanya benda-benda yang berwujud saja dan hak mengambil manfaat bukan termasuk benda. Sedang menurut golongan Maliki, Hambali dan As syafi'i, dapat diwarisi.
- c). Pemilik manfaat berkewajiban mengganti kerugian apabila sengaja merusakkan atau menjadikan cacat benda yang dipergunakan. Karena bendanya adalah milik orang lain yang berada ditangannya sebagai amanat.
- d). Menurut golongan Hanafi biaya yang dikeluarkan untuk benda yang dipergunakan menjadi tanggungan pemilik manfaat (pemakai) apabila penggunaan itu secara grati seperti pinjam-meminjam, wasiat. Apabila tidak demikian seperti dalam sewa menyewa misalnya, maka biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan pemilik benda. Sedang menurut golongan Maliki Hambali dan Syafi'i, biaya yang dikeluarkan adalah menjadi tanggungan pemilik benda apabila penggunaan itu secara gratis seperti dalam pinjam-meminjam, sebabnya hal yang demikian itu telah menjadi kewajiban pemilik-

kedalam milik yang dihormati dan tidak ada halangan syara' untuk memilikinya. Oleh karena itu pengambilan atau penguasaan atas benda bebas adalah sah bagi mereka yang tidak cakap bertindak hukum. Misalnya seorang anak kecil yang mengumpulkan pasir dari sungai, maka pasir itu adalah menjadi hak anak tersebut, ia mau menjualnya, memberikan kepada orang lain ataupun mengembalikan lagi ke sungai.

Sedang yang termasuk benda bebas/mubah adalah tanah yang belum di miliki, ikan-ikan dalam sungai, tumbuh-tumbuhan dan hewan di hutan belantara, burung-burung di alam bebas dan harta-harta terpendam yang ada diperut bumi. Semua itu adalah termasuk barang mubah yang semua orang dapat memilikinya.

Apabila seseorang ingin memiliki benda bebas/mubah, maka ia harus menguasai benda itu dengan maksud memiliki (ihraz). Sedang memiliki suatu benda yang mubah dengan jalan ihraz, memerlukan dua syarat:

Pertama; Benda tersebut tidak boleh telah dikuasai oleh orang lain terlebih dahulu.

Misalnya, Seseorang yang telah mengumpulkan air hujan dalam satu wadah kemudian orang tersebut membiarkan air itu, tidak diangkat ketempat yang lain. Maka dalam keadaan yang seperti ini orang lain tidak berhak lagi untuk mengambil air dalam wadah tersebut. Karena air tersebut tidak lagi menjadi benda mubah lantaran telah di

yang banyak menghasilkan buah mangga. Maka pemilik kambing atau pohon mangga tersebut menjadi pemilik yang sah atas benda baru yakni dua ekor kambing dan beberapa buah mangga. Hal yang demikianlah, bahwa pemilik benda asal dianggap telah memperoleh benda baru disebabkan karena kelahiran atau sesuatu yang terjadi dari benda asal (tawalludu minal mamluk).

Menurut Musthafa Salabi, bahwa penambahan dari kelahiran bukan termasuk cara baru untuk memperoleh hak milik. Sebab bila diperhatikan tentang ciri-ciri khusus milik penuh yaitu bahwa sesuatu benda dan sekaligus manfaatnya (buah hasilnya) yang berkaitan maupun yang berpisah adalah menjadi miliknya (pemilik milik penuh) dan tak seorangpun dapat turut campur memilikinya. Dengan demikian, segala benda yang tumbuh atau lahir dari padanya ditetapkan berdasarkan sebab pertama yang menjadikan tetapnya milik benda pokok (asal).

Barang siapa memiliki seekor ternak yang diperoleh dengan cara akad ataupun pewarisan, maka ia memiliki binatang itu dan segala yang lahir dari padanya dimasa-masa yang akan datang, sebab hasil-hasil itu ketika terwujud adalah merupakan bagian yang terpisah dari benda pokok. Oleh karena itu bukanlah termasuk cara yang baru untuk memperoleh hak milik. Dan penambahan atau kelahiran dari sesuatu benda yang dimiliki tidaklah tepat jika dipandang sebagai cara tersendiri memperoleh hak mi-

lik (milik sempurna).(Syalabi,II/1960:281).

Sedang para Fuqaha' yang berpendapat bahwa pertamahan dari kelahiran sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik baru adalah Musthafa Ahmad Zarqa',Hasbi As Shiddieqy.

Dari beberapa cara untuk memperoleh hak milik sebagaimana telah dijelaskan diatas, oleh Masdhuha A.R. dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Karena adanya usaha (ikhtiyar) seseorang dan bukan karena adanya usaha (jabriyah) seseorang yaitu secara otomatis atau paksaan.

Karena adanya usaha seseorang ialah cara-cara, pengambilan atau penguasaan benda bebas, akad dan syuf'ah bagi golongan yang menjadikannya sebagai cara tersendiri.

Bukan karena adanya usaha seseorang ialah cara - memperoleh milik penuh dengan penggantian atau pewarisan. Pewarisan menetapkan milik bukan karena usaha seseorang baik pemilik pertama (yang mewariskan) maupun dari pemilik kedua (ahli waris).

2. Yang menimbulkan (melahirkan) milik pertama dan yang memindahkan milik.

Yang menimbulkan milik pertama ialah pengambilan atau penguasaan benda mubah. Yang dimaksud ialah bahwa tetapnya benda bebas tersebut sebagai milik bila ternyata

Al qur'an. (Ahmadi,1980:58).

Islam membolehkan pemilikan tanah dan sumber-sumber kekayaan alam yang lain, dan boleh menggunakannya untuk produksi dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan Khilafah dari Allah atas miliknya. Yaitu dengan mengikuti perintah-perintah tuhan dalam usaha memperoleh miliknya itu. Jadi bukan dari hasil merampas, menipu, mencuri, melakukan pengkhianatan maupun menyuap pada hakim.(Thahir,1985:199).

Selain dari itu menurut sistim ekonomi Islam, lama pemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia. Kalau seorang manusia telah meninggal dunia, maka harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. (Daud Ali,1986:7).

Dan agar tercipta keserasian antara kemaslahatan yang mana telah disyari'atkan dengan bahaya yang kadang-kadang timbul dalam menggunakan hak miliknya tersebut, yaitu pengaruh dan manfaatnya yang kembali pada dirinya dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Maka perlu adanya pembatasan terhadap hak milik. Dalam hal ini Abdullah Al 'Arabi menjelaskan tentang beberapa hal yang membatasi hak milik yaitu :

1. Membatasi pemilik harta agar dirinya tidak mengembangkan hartanya dengan semaunya, sehingga dirinya

menjadi lintas darat yang menghalangi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

2. Membatasi kebebasan pemilik harta, yaitu dengan diwajibkan zakat bila telah mencapai satu nisab atau lebih.
3. Membatasi kebebasan pemilik harta, yaitu dengan membelanjakan di jalan Allah menurut kadar yang telah ditentukan.
4. Membatasi kebebasan pemilik harta agar hartanya itu tidak menjadikan sumber bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum.
5. Membatasi kebebasan pemilik harta dengan menghalangi dirinya untuk tidak menjalankan riba, penipuan atau monopoli.
6. Membatasi kebebasan pemilik harta agar tidak keluar-atau menyimpang dari pembagian warisan, wasiat dan wakaf.
7. Membatasi kebebasan pemilik harta agar dirinya tidak menelantarkan/membiarkan barangnya dengan sia-sia.
(Al Arabi, tt:59).

Batasan yang demikian itu berlaku terhadap hak milik perseorangan yang telah diwajibkan oleh ajaran Islam, untuk dilaksanakan setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya memeluk agama Islam, dan sebagai pedoman bagi mereka yang hendak memanfaatkan hak miliknya.

rangan diakui sebagai hasil jerih payah/usaha yang halal dan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang halal pula. (Endang, tt:164).

Manusia adalah khalifah Allah di bumi ini, dengan diangkatnya manusia menjadi khalifa oleh Allah, maka manusia wajib memelihara apa yang dalam hematnya patut dipelihara, khususnya perintah-perintah Allah juga larangan-larangan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Asunnah. (Thahir, 1985:85)

Berdasarkan kebenaran bukti yang menguraikan ketidakberdayaan manusia, disamping menunjukkan kekuasaan Allah - secara logis dan moral, menunjukkan pula bahwa tidak ada sesuatu yang menjadi milik atau dianggap milik manusia dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan kata lain bahwa manusia dianggap sebagai anak, seperti anak yang menetek, masih harus dituntun duduk diatas pangkuan orang tuanya dan berjalan memegangi jari-jari mereka. Bahkan ia lebih tidak berdaya karena kedudukan Allah jauh lebih tinggi dibanding orang tua itu.

Jadi, segala yang dianggap milik manusia pada dasarnya adalah milik Allah Swt. dan telah menunjukkan manusia pada waktu tertentu dan dengan cara yang terbatas. (Hasani, tt:69).